

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perpolitikan bangsa Arab pada mulanya hidup bersuku–suku/kabilah–kabilah yang berdiri sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh (Sulaeman, 2014, hlm. 100) kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah, dan menghadang musuh dari luar kabilah. Bentuk pemerintahan bangsa Arab yang cukup sederhana karena wilayah–wilayah yang terbatas dan memiliki pemimpin – pemimpin tersendiri di wilayah yang tidak terlalu luas, tidak seperti masa setelah masuknya Islam yang memang adanya perluasan–perluasan wilayah menjadi sebuah negara.

Sejarah Islam dimulai ketika datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, yang membawa perubahan bagi masyarakat Arab ke pelbagai aspek baik secara agama, sosial, budaya, dan politik. Menyatukan berbagai suku–suku kerajaan–kerajaan, dan agama–agama, menjadikannya satu pemerintahan Islam. Wilayah–wilayah yang asalnya tidak memiliki keterikatan akhirnya berada di bawah naungan satu kepemimpinan yang dapat diartikan pemerintahan yang memiliki asas agama, yakni agama Islam. Kekuasaan Islam berpusat di Madinah dan terus berkembang pada masa kepemimpinan–kepemimpinan setelahnya. Menurut Al-Maududi (Azizuddin dan Sani, 2002, hlm. 59) bahwa negara dan pemerintahan Islam bukanlah lahir secara tiba–tiba, ialah suatu usaha yang besar dan menyeluruh termasuk proses pentarbiyah serta pembentukan pikiran rakyat umum.

Dalam sejarahnya negara Islam pertama terbentuk pada masa Nabi Muhammad SAW. tepatnya di Madinah dengan menjadikan Muhammad sebagai pemimpinnya, dan perluasan pemerintahan Islam terjadi di bawah naungan Muhammad SAW sampai daerah–daerah Hijjaz. Ketika Muhammad SAW wafat, ada yang cukup menarik yakni tidak ditunjuknya secara tegas seseorang yang akan menggantikannya siapa, bagaimana cara pemilihannya, dan bagaimana bentuk pemerintahannya. Seperti dijelaskan dalam (Sulasman, 2013, hlm. 102) dikatakan bahwa hal tersebut menggambarkan bahwa jenis pemerintahan, dan cara memilih

pemerintahan belum dinyatakan secara tegas oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika Muhammad SAW wafat menimbulkan berbagai pandangan dikalangan para sahabat. Hal tersebut menjadi suatu problema tersendiri bagi pemerintahan yang baru dipimpin oleh satu orang, dan menjadikan berbagai kalangan dalam masyarakat Islam pada waktu itu memiliki pendapat tersendiri tentang pemimpinnya.

Penyebutan kepada pemimpin Islam setelahnya dikenal dengan sebutan khalifah. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat sesudah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas – tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan (Yatim, 2008, hlm. 35). Dijelaskan lebih lanjut dalam buku (Hitti, 2001, hlm. 71) Khalifah berarti menggantikan Muhammad, sebagai kepala negara. Pertalian khalifah dengan agama hanyalah sebagai pelindung dan pemelihara. Artinya khalifah ialah penyebutan untuk pemimpin sebuah wilayah yang sangat luas, dalam padanan lain ialah sebuah kerajaan, kekaisaran, dan kesultanan. Terkhusus kepada wilayah yang mayoritas Islam pada saat itu penyebutan seorang Khalifah tidak hanya memimpin negara akan tetapi agama, yakni agama Islam. Khalifah tidak melihat seberapa luas wilayah yang dimilikinya, bukan juga sebuah suku seperti Quraisy ataupun masyarakat arab pada umumnya, tetapi seperti yang dijelaskan diatas ialah seorang pemimpin negara dan agama, namun pada masa – masa awal kekhalifahan Islam ini, baik itu khalifah dan yang akan menjadi khalifah ialah orang yang beragama Islam dan lebih mengkhhususkan kepada suatu suku, yakni suku Quraisy.

Tidak adanya contoh atau aturan baku bagaimana sistem pemerintahan tersebut harus diterapkan, perbedaan – perbedaan ini terlihat seiring perjalanan peradaban Islam itu, dengan adanya pembabakan tersendiri. Dimulai contohnya dari Khalifah Abu Bakr, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sampai kepada Mu'ayyah bin Abu Sufyan yang akan dibahas ialah dari suku Quraisy. Khalifah setelah Muhammad yakni Abu Bakar ialah seorang Quarisy dan di antara para pembesar kaum Quraisy (ath-Thahtawi, 2009, hlm. 46). Umar bin Khattab ialah keturunan dari Al-Fihr. Al-Fihr ini tidak lain ialah Quraisy (Muhammad al-Khamis, Utsman, 2013, hlm. 86). Begitu pula Utsman bin Affan, sebagai kaum Quraisy yang sangat dicintai oleh kaum Quraisy itu sendiri, karena kaya raya, berkedudukan tinggi,

dan halus budi pekertinya (ath-Thahtawi, 2009, hlm. 266). Ali bin Abi Thalib yakni sepupu dari Muhammad dari keluarga Bani Hasyim Quraisy (al-Khamis, 2013, hlm. 167). Hal ini tidak lepas dari pernyataan Abu Bakr pada pemilihan khalifah pertama yang akan menggantikan Nabi Muhammad yang telah wafat. Abu Bakar menyampaikan pidato umumnya, bertempat di balairung keluarga Sa'idah. Seperti dituliskan dalam buku (al-Khamis, 2013, hlm. 46) salah satu penggalan pidato dari Abu Bakar mengenai permasalahan kepemimpinan/khalifah Islam bahwa (Quraisy) orang – orang Arab yang paling mulia tempatnya tinggalnya (Makkah). Mereka jugalah suku yang paling mewakili Arab Asli.

Abu Bakar ialah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dalam buku (Amin, 1999, hlm. 7) dijelaskan bahwa Abu Bakar termasuk seorang laki-laki yang pertama kali masuk Islam, selain seorang sahabat yang paling dekat dengan Muhammad SAW sebelum dan sesudah kenabiannya. Abu Bakar juga merupakan mertua Muhammad SAW karena putrinya Aisyah, dinikahi oleh Muhammad SAW.

Kedekatan antara Muhammad SAW, dan Abu Bakar dapat dikatakan sangat erat, artinya ketika Abu Bakar menyampaikan hal tersebut tentu saja tidak akan ditolak oleh orang-orang Islam pada saat itu. Suatu penyampaian tentang syarat seorang pemimpin yang akan menjadi khalifah, yakni kelebihanannya orang-orang Arab (Quraisy) ini untuk menjadi pemimpin. Hal ini pula yang menjadi suatu pandangan masyarakat Islam dalam memilih pemimpin dari orang-orang Arab (Quraisy) sebagai pemimpinnya, pada masa-masa awal pemerintahan Islam.

Pada awal pemerintahan Islam yang terus berganti khalifah (pemimpin) sejak masa Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, maupun Ali bin Abi Thalib yang lebih dikenal dengan masa Khulafaur Rasyidun tidak pernah ditunjuknya secara langsung seseorang yang akan menggantikan kedudukan khalifah. Dalam buku Anthony Black (2006, hlm. 46 – 47) dikemukakan bahwa Muhammad tidak menetapkan siapa yang akan menggantikannya ketika ia wafat (632 M), dan sebelum penaklukan betul – betul dimulai, para sahabat memilih seorang pemimpin dan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar (632 – 634 M) seorang pemimpin yang sederhana kemudian diteruskan oleh Umar (634 – 646 M). Seorang tokoh yang dihormati, dan di bawah pemerintahannya umat Islam menaklukan berbagai wilayah yang kelak

menjadi jantung kekuasaan mereka. Selain itu, Umar juga merupakan subjek atau sumber bagi kebanyakan riwayat yang penting. Umar kemudian digantikan oleh Utsman (646 – 656 M). Ketiganya berasal dari suku Muhammad yakni Quraisy, dan dua yang terakhir dipilih oleh sebuah dewan para tokoh terkemuka. Maka dari itu, menyambung dengan bahasan sebelumnya, penekanan kepemimpinan dari khalifah kepada khalifah selanjutnya hanya sekedar Islam dan Quraisy tidak dijadikannya aturan baku secara tentang cara pemilihannya, namun khulafaurrasyidun menjadikannya suatu rujukan tersendiri yang tidak tertulis akan pengangkatan khalifah selanjutnya. Berbagai macam cara digunakan dalam pemilihan khalifah, tetapi satu pola yakni Musyawarah. Dalam skripsi ini akan dibahas perbedaan cara dan pola yang digunakan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam menentukan khalifah selanjutnya, dan sejak masa Mu'awiyah sampai selanjutnya dikenal dengan kekhalifahan Dinasti Umayyah.

Dinasti Umayyah merupakan dinasti Arab sentris. Semua sultan – sultan yang berkuasa sepanjang sejarahnya berkebangsaan Arab, dan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kekuasaan Dinasti Umayyah dengan khalifah pertamanya Mu'awiyah bin Abu Sufyan terbentang luas hingga bagian timur. Wilayah Syria yang berpusat di Damaskus, sebagai pusat politik kerajaan kaum Syi'ah pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Mu'awiyah tidak hanya mengonsolidasi kekuatan negara, melainkan juga perluasan wilayah kekuasaan. Dalam hal tersebut para ahli sejarah menyebutnya Umar bin Khattab kedua (Sulaiman, 2014, hlm. 253). Pemerintahan Mu'awiyah tidak hanya ditandai dengan terciptanya konsolidasi internal, tetapi juga perluasan wilayah Islam. Jika sebagai seorang prajurit, kualitas Mu'awiyah jauh lebih rendah dari 'Ali, tetapi sebagai organisator militer, Mu'awiyah adalah yang paling unggul di antara rekan-rekan sezamannya (Hitti, 2018, hlm. 241 – 242). Hal ini juga dikemukakan pula dalam buku (Lapidus, 1999, hlm. 87) bahwa semenjak berkuasa, Mu'awiyah memulai langkah – langkah baru untuk merekonstruksi dan sekaligus kekuasaan khilafah, dan menerapkan paham golongan bersama dengan elite pemerintahan. Perubahan yang cukup penting dalam corak pemerintahan Islam pada masa Mu'awiyah ialah khalifah pertama yang mengubah bentuk pemerintahan dari republik

menjadi monarki (Mulia, 2010, hlm. 18). Mu'awiyah sendiri memiliki kemampuan menonjol sebagai penguasa. Mu'awiyah dilaporkan memiliki sifat *hilmi* yakni ketenangan (Watt, 1990, hlm. 18).

Pada kiprahnya menjadi khalifah, Mu'awiyah tidak hanya menjadi penerus kekhalifahan dalam mempertahankan wilayah dan pemerintahan berdaulat, akan tetapi juga memperluas wilayah Kekhalifahan Islam. Penyebutan sebagai Umar bin Khattab yang kedua, karena pada masa – masa sebelumnya Umar bin Khattab lah khalifah pertama yang memperluas wilayah kekhalifahan Islam. Maka dari itu Mu'awiyah melakukan hal yang sama pula dalam masa pemerintahannya. Sifat-sifat seorang penguasa dalam mengorganisir pemerintahan dan peperangan (militer) menjadi menarik bagi penulis dalam mengkaji sosok Mu'awiyah bin Abu Sufyan ini.

Mu'awiyah masih mempunyai kekerabatan dengan para khalifah/pemimpin Islam Sebelumnya seperti Muhammad bin Abdullah, dan Ali bin Abi Thalib dari garis Abdi Manaf, sedangkan dengan Utsman bin Affan ialah dari Umayyah. Mu'awiyah ialah seorang yang menjadi khalifah Islam dan mendirikan sebuah Dinasti Umayyah atau disebut juga Bani Umayyah. Nama lengkap Mu'awiyah ialah Mu'awiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Qilab.(Ash Shalabi, 2016, hlm. 16). Nama *Daulah Umawiyah* atau Dinasti Umayyah itu berasal dari nama “Umawiyah ibnu ‘Abdi Syams ibnu ‘Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin – pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah (Syalabi, 1983, hlm. 24). Maka dari itu Mu'awiyah bin Abu Sufyan, seperti yang telah dijelaskan di atas dari sudut pandang kesukuan dia memiliki kehormatan seorang bangsawan, kekayaan, dan anak. Dari sudut pandang agama dalam memimpin pada saat itu dia juga termasuk suku Quraisy yang dapat memimpin masyarakat yang mayoritas Islam, dan masuk dalam kriteria yang sama dengan khalifah – khalifah sebelumnya.

Sejarah Islam, merupakan sejarah yang sangat panjang sebuah agama dan kebudayaan yang berevolusi menjadi suatu peradaban yang sangat luas bahkan sampai sekarang. Dalam (Yatim, 2008, hlm. 2) peradaban Islam yang dimaksudkan ialah, Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak terkenal, dan

diabaikan oleh bangsa – bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan Islam di dunia, membina satu kebudayaan, dan peradaban yang sangat penting dalam sejarah manusia hingga sekarang.

Jika melihat dari definisi yang dikemukakan di atas penulis menarik dua kesimpulan, *pertama* peradaban Islam dimulai sejak diwahyukannya Islam kepada Nabi Muhammad SAW lebih tepatnya ketika membangun pemerintahan di Madinah. Bahwasanya dalam peradaban Islam itu tidak mungkin lepas dari seorang figur Muhammad SAW yang dapat dikatakan menjadi seorang pendiri pemerintahan/negara bagi rakyat Arab khususnya yang mayoritas Islam; *kedua* sejarah yang penting bagi umat manusia, artinya peradaban Islam itu masih ada eksistensinya pada masa kini, baik secara kebudayaan maupun keilmuannya. Tentang peradaban itu sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Supardan (2011, hlm. 345) konsep peradaban atau *civilization* merupakan konsep yang merujuk pada suatu entitas kultural seluruh pandangan hidup manusia yang mencakup nilai, norma, institusi, dan pola pikir terpenting dari suatu masyarakat yang terwariskan dari generasi ke generasi. Mengacu pada definisi di atas yang dikaitkan kepada pembahasan skripsi ini, bahwasanya peradaban ialah segala sesuatu yang terwariskan dari generasi ke generasi. Melihat kepada peradaban Islam tentu saja adanya sesuatu yang terwariskan sejak dari Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Tentu orang – orang menyimpulkan bahwa yang diwarisi ialah agama Islam itu sendiri. Memang benar, akan tetapi peradaban jauh lebih luas dari pada agama dan budaya, salah satunya ialah pemerintahan dan kepemimpinan dari peradaban Islam itu sendiri yang dapat menjaga eksistensi peradabannya tersebut.

Peradaban Islam atau kekhalifahan Islam dan orang-orang yang memimpinnya sangat panjang dan banyak figur. Jika figur seorang Nabi Muhammad SAW sebagai pendiri tentu dikenal, kemudian figur-figur suksesi atau penerus yang memimpin peradaban Islam itu sendiri yang sangat terkenal dapat dikatakan ialah *Khulafaur Rasyidun* yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai penerus dari kepemimpinan Muhammad SAW sebagai pemimpin peradaban Islam. Akan tetapi bagaimana penerus setelahnya, tentu saja figur-figur pemimpin setelahnya hanya diketahui sekedar namanya saja, belum tentu

sepak terjang dalam memimpin, kemudian kontribusi dalam peradaban, khususnya peradaban Islam ini diketahui oleh khalayak secara umum, contohnya Mu'awiyah bin Abu Sufyan itu sendiri.

Kemudian setelah itu masih banyak penerus dari *Khulafaur Rasyidun*, tentu saja dari masa ke masa terjadinya suatu perubahan yang tentu saja itu terjadi pada suatu peradaban. Dijelaskan dalam (Supardan, 2011, hlm. 337) dikemukakannya konsep perubahan, bahwasanya konsep perubahan merupakan istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda. Perubahan yang terjadi pada peradaban atau kekhalifahan Islam yang ingin ditekankan oleh penulis ialah dari segi sistem pemerintahan yang digunakan oleh kekhalifahan Islam.

Kemudian ketika terbunuhnya Utsman digantikan oleh Ali dan mengakibatkan perselisihan antara dua kelompok besar antara Mu'awiyah dan Ali, ketika terpecahnya kelompok Ali yang disebut dengan *khawarij* yang tidak setuju dengan *Arbitrase* antara keduanya. *Khawarij* adalah pasukan yang berada di pihak Ali bin Abi Thalib yang melakukan pemberontakan kepada Ali setelah terjadinya arbitrase (al-Usairy, 2006, hlm. 176). Maka terbunuhlah Ali oleh kelompok *khawarij* tersebut, kemudian putra Ali mengakui kekuasaan Mu'awiyah, maka dimulailah kekhalifahan Umayyah (661 – 750 M). Persatuan Islam dalam bentuk baru telah dimulai (al-Usairy, 2006, hlm. 177).

Permasalahan yang cukup mendasar pada peralihan Ali kepada Mu'awiyah dan Mu'awiyah kepada anaknya Yazid kelak ialah bentuk kepemimpinannya. Masalah yang diperselisihkan oleh umat adalah tentang siapa yang berhak memimpin umat dan bagaimana cara memilihnya (Black, 2006, hlm. 47). Hal ini tentu saja akan menjadi sumber perpecahan pada masa Mu'awiyah dan seterusnya bahkan sampai kini. Dapat dilihat dalam konteks modern antara Sunni dan Syi'ah yang masih terus berselisih diberbagai wilayah. Khalifah (pemimpin) masyarakat yang mayoritas Islam dipilih dengan cara mufakat/musyawarah meskipun dalam keadaan yang berbeda-beda seperti dalam keadaan khalifah sakit parah, maupun ketika terjadi konflik seperti terbunuhnya khalifah itu sendiri. Jalur musyawarah/mufakat yang memiliki sifat demokrasi lebih diutamakan.

Memasuki masa kekuasaan Mu'awiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchi heredities* (kerajaan turun temurun) (Yatim, 2008, hlm. 42). Hal tersebut merupakan salah satu contoh kontroversial pada masa kekhalifahan Islam, tidak hanya itu perubahan yang terjadi dalam kekhalifahan Dinasti Umayyah ini banyak intrik–intrik politik yang jika dicermati cukup menarik dalam bidang politik dan agama. Hal ini menjadi salah satu daya tarik penulis mengangkat tokoh Mu'awiyah bin Abu Sufyan karena konflik yang mengitarinya, salah satunya ialah kebijakan demokrasi kekhalifahan Islam menjadi monarki.

Maka dalam serangkaian sejarah Islam, kekhalifahan Umayyah menjadi salah satu sejarah Islam yang sangat kontroversial awal mulanya kekhalifahan yang menganut sistem kerajaan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Sosok awal ini ialah Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang cukup banyak beranggapan bahwa sosok Mu'awiyah ini haus akan kekuasaan dan menyimpang dari kaidah – kaidah kepemimpinan dalam Islam. Diubahnya sistem pemerintahan/kekhalifahan Islam pada saat itu, pewarisan peradaban Islam sampai saat ini tetap eksis meskipun hal tersebut tidak mudah. Jika melihat kepada dewasa ini, berbagai sistem politik yang dianut oleh berbagai negara Islam dibelahan dunia contohnya sistem yang ada seperti demokrasi dan monarki. Dalam bentuk apapun kebijakan pada masa Mu'awiyah yang dikatakan bertentangan dengan berbagai golongan sekalipun itu dijalankan dengan keadaan politik pada masa itu, bagaimanapun sistemnya yang terpenting ialah tetap jalannya pemerintahan Islam, karena dalam konsepsinya sistem politik merupakan suatu istilah yang mengacu kepada semua proses dan institusi yang mengakibatkan pembuatan kebijakan publik, perjuangan persaingan kelompok untuk menguasai secara politik adalah suatu aspek utama dalam suatu sistem politik (Supardan, 2011, hlm. 568).

Artinya adanya orang–orang yang diatur oleh pejabat yang berwenang dalam pembahasan ini adalah Mu'awiyah yang memiliki wewenang selaku khalifah dalam merubah tatanan/bentuk kekhalifahan itu sendiri. Sistem monarki yang masih eksis pada masa kini dan pada masa kekhalifahan Islam yakni pada masa Mu'awiyah bin



Abu Sufyan tentu saja berbeda, maka dari itu untuk menjadi bahan kajian dan keilmuan masa kini tentu saja penulis berharap akan dapat mewarisi setidaknya dalam bentuk keilmuan pada masa kini terlebih yakni keilmuan yang positif, yang berdampak kepada motivasi dalam mengkaji ilmu–ilmu sejarah. Sosok dari Mu’awiyah ini banyak hal – hal yang menarik untuk diulas dalam kajian sejarah perdaban Islam, pemimpin yang sangat terkenal dengan kontroversialnya, dan pandangan–pandangan pro – kontra terhadap dirinya sampai masa kini.

Sekilas gambaran dari seorang Mu’awiyah menjadi khalifah Islam dengan kepentingan korelasi pada masa kini. Penulis ingin mengulas bagaimana latar belakang serta kontribusi Mu’awiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah Islam, yang bahkan terkenal dengan sepak terjang dan kebijakan yang kontroversial pada masa itu seperti merubah sistem pemerintahan Islam menjadi Monarki, maka dari itu penulis mengambil judul “KHALIFAH MU’AWIYAH BIN ABU SUFYAN : PELETAK DASAR PEMERINTAHAN ISLAM MONARKI 661 – 680 M.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang dikaji ialah bagaimana kiprah Khalifah Mu’awiyah bin Abu Sufyan : Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661 680 M ?.

Adapun dari rumusan masalah tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, antara lain :

1. Bagaimana proses Mu’awiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah?
2. Bagaimana kondisi sosial politik pemerintah Islam pada masa Mu’awiyah bin Abu Sufyan?
3. Mengapa Mu’awiyah mengubah kekhalifahan Islam kepada sistem monarki?
4. Bagaimana dampak perubahan sistem pemerintahan oleh Mu’awiyah bin Abu Sufyan terhadap sistem politik Islam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Menjelaskan proses Mu’awiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah.
2. Mendeskripsikan kondisi sosial politik pemerintah Islam pada masa pemerintahan M’uawiyah bin Abu Sufyan.
3. Mengetahui kiprah Mu’awiyah dalam menjalankan kekhalifahan Islam yang Monarki

4. Untuk mengetahui dan memahami perubahan sistem pemerintahan Islam yang terjadi pada masa Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil dari penulisan ini adalah

1. Memperkaya penulisan sejarah kawasan, khususnya kawasan Timur Tengah.
2. Memperkaya penulisan sejarah Islam terutama dalam bidang politik, yaitu ketika pemerintahan Islam mengalami sebuah kekacauan dan perubahan sistem pemerintahannya dari musyawarah menjadi monarki.

#### 1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Pada bab pertama yakni pendahuluan ini akan diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi, dimana dalam pendahuluan ini akan diuraikan alasan penulis memilih topik yang akan diangkat dalam penelitian.

Kemudian dilanjutkan bab dua kajian pustaka. Kajian pustaka ini akan diuraikan konsep, generalisasi, bahkan teori yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Konsep politik seperti mencakup kepemimpinan, pemerintahan dan geopolitik, sosial dan budaya; serta konflik. Kemudian akan dikemukakan pula penelitian terdahulu yang terkait dengan penulisan skripsi. *Khalifah M'awiyah bin Abu Sufyan : Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661 – 680 M* judul ini akan dikaji menggunakan berbagai sumber baik dari buku, jurnal, artikel, thesis, dan skripsi.

Pada bab III akan diuraikan metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode historis dengan menggunakan analisis biografi dari tokoh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, metode historis ini terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pada bab IV ini penulis akan menguraikan berbagai temuan penulis dari hasil kajian literatur. Kemudian akan dikemukakan pula jawaban – jawaban atas rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan dalam bab pendahuluan.

Dalam bab akhir yakni bab V, penulis akan memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yaitu tentang *Mu'awiyah bin Abu Sufyan : Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki (661 – 680) M.* selain itu penulis akan memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi penelitian selanjutnya jika akan membahas topik yang sama.